

BAB I. PENDAHULUAN

- Gambaran Umum Organisasi
- Tugas Pokok dan Fungsi
- Isu Strategis

GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Biro Pembangunan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019, merupakan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) sebagai perwujudan dari pelaksanaan *good governance* yang transparan dan akuntabel. Selain itu LKj IP SKPD merupakan wujud dari kinerja dalam pencapaian visi dan misi sebagaimana dijabarkan dalam tujuan/sasaran strategis, yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018.

LKj IP Biro Pembangunan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jambi ini disusun atas dasar Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan laporan Kinerja Pemerintah Daerah.

Tata pemerintahan yang baik merupakan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif. Upaya untuk mewujudkan suatu tata pemerintahan yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran ketiga pilar, yaitu pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat. Upaya tersebut dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya yaitu :

- a. TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN
- b. UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN
- c. Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- d. PERPRES No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Satu diantara inti pokok dari peraturan tersebut di atas adalah bahwa setiap instansi pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dengan tujuan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai satu diantara beberapa prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya. Oleh karena itu Biro Pembangunan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jambi sebagai instansi Pemerintah Provinsi wajib mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tersebut.

Biro Pembangunan dan Kerjasama ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jambi mempunyai tugas dan fungsi Biro Pembangunan dan Kerjasama terdiri dari 3 Bagian dan 9 Subbagian yaitu :

1. Bagian Bina Program
 - a. Sub Bagian Penyusunan dan Pemantauan Program
 - b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
 - c. Sub Bagian Pemangunan Sarana Prasarana Fisik dan Perhubungan
2. Bagian Layanan Pengadaan
 - a. Sub Bagian Manajemen Pengadaan dan Informasi
 - b. Sub Bagian Sanggah, Pengaduan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - c. Sub Bagian Tata Usaha Biro
3. Bagian Kerjasama
 - a. Sub Bagian Kerjasama Dalam Dalam dan Luar Negeri
 - b. Sub Bagian Kerjasama Antar Lembaga
 - a. Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi Kerjasama

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Biro Pembangunan dan Kerjasama Setda Provinsi Jambi Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jambi mempunyai tugas dan fungsi Biro Pembangunan dan Kerjasama sebagai berikut

1. Tugas :

Membantu Sekretariat Daerah dalam rangka penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif bidang pembangunan, kerjasama, layanan pengadaan barang-barang dan jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi :

- a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Biro Pembangunan dan Kerjasama
- b. Pengkoordinasi perumusan dan pembinaan perencanaan serta pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah.
- c. Pelaksanaan fasilitasi pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah bidang-bidang pembangunan, kerjasama, layanan pengadaan barang dan jasa Pemerintah.
- d. Pelaksanaan fasilitasi pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah bidang pembangunan, kerjasama, layanan pengadaan barang dan jasa Pemerintah dan penyelenggaraan urusan Pemerintah di Wilayah Provinsi.
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang-bidang pembangunan, kerjasama, layanan pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

- f. Penyediaan layanan pengadaan barang dan jasa Pemerintah.
- g. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan jasa dan ketatausahaan Biro.
- h. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

ISU STRATEGIS

Beberapa isu strategis yang berkembang terkait dengan pelaksanaan Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Pemerintah Provinsi Jambi antara lain, yaitu : kurangnya infrastruktur pendukung, belum efektifnya pelaksanaan pengendalian pembangunan, peningkatan efektifitas pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah serta peningkatan pengembangan kerjasama pembangunan Pemerintah Provinsi Jambi.

Permasalahan utama yang berkembang di bidang infrastruktur antara lain :

1. Masih kurangnya infrastruktur penunjang transportasi berupa jalan dan jembatan.
2. Terbatasnya akses perhubungan di daerah.
3. Belum optimalnya pemenuhan infrastruktur pengairan dan pemukiman.

Akibat dari masih kurangnya infrastruktur penunjang transportasi dan terbatasnya akses perhubungan di daerah mempengaruhi tingkat perkembangan industri kecil di Provinsi Jambi. Padahal peranan industri kecil dalam perekonomian daerah sangat penting karena mampu menyerap sebagian besar tenaga kerja sehingga dapat mewujudkan pemerataan kesempatan berusaha dan pendapatan. Sementara itu industri kecil kenyataannya adalah sangat heterogen karena meliputi berbagai kegiatan sektor ekonomi, seperti pertanian, peternakan, perikanan, industri pengolahan, angkutan dan perdagangan serta jasa.

Belum optimalnya pemenuhan infrastruktur pertanian seperti waduk dan irigasi juga sangat mempengaruhi taraf perekonomian masyarakat jambi karena infrastruktur penunjang ini secara langsung bersentuhan dengan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat terutama bagi para petani. Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur pertanian tersebut dapat meningkatkan produksi pangan sehingga akan meningkatkan ketahanan pangan di Provinsi Jambi.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang bersumber dari APBD Provinsi Jambi, perlu dilakukan monitoring dan pengendalian yang efektif agar program dan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan tersebut dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Biro Pembangunan dan Kerjasama selaku administrator pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pemerintah Provinsi Jambi berkewajiban untuk melaksanakan monitoring dan pengendalian tersebut.

Ketersediaan infrastruktur adalah faktor utama penggerak pembangunan dan perekonomian, sehingga dengan rendahnya tingkat investasi untuk penyediaan infrastruktur akan sangat berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi suatu Daerah. Tantangan utama yang dihadapi adalah *funding gaps* antara kebutuhan investasi infrastruktur dengan relatif terbatasnya kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Oleh karenanya muncul pertimbangan perlunya memperkuat kerjasama pemerintah dengan pihak lain yang dilihat dari 3 (tiga) dimensi sebagai berikut yaitu kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak dari Luar Negeri, kerjasama dengan Pihak dari dalam neger dan kerjasama antar lembaga Pemerintah.

Berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Provinsi Jambi, dengan diterbitkannya Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah mewajibkan Pemerintah Daerah untuk membentuk Unit Layanan Pengadaan.

Saat ini Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Provinsi Jambi resmi terbentuk dengan terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 32 tahun 2016 yang masih bersifat adhoc dan melekat pada SKPD yang sudah ada yaitu Biro Pembangunan dan Kerjasama.

Biro Pembangunan dan Kerjasama harus mampu memberikan dukungan dalam implementasi pelaksanaan fungsi Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Jambi sehingga diharapkan dapat terwujud proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang transparan, efektif dan efisien.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

- Perencanaan Kinerja
- Program dan Kegiatan

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan yang tepat sangat diperlukan dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas, serta sebagai pedoman dan tolok ukur sebagai upaya menciptakan peningkatan kinerja pelaksanaan pembangunan khususnya pada Biro Pembangunan dan Kerjasama Setda Provinsi Jambi serta sebagai acuan dalam berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan yang dituangkan dalam bentuk Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021 dan Rencana Kerja Tahun 2018 Biro Pembangunan dan Kerjasama Setda Provinsi Jambi.

Biro Pembangunan dan Kerjasama dalam Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021 memiliki tujuan 3 (tiga) tujuan dan 4 (empat) sasaran utama yang ingin dicapai yaitu :

Tujuan :

1. Terwujudnya tertib administrasi dalam pelaksanaan pembangunan dan kerjasama pemerintah
2. Mewujudkan pembinaan, fasilitasi dan koordinasi di Bidang Administrasi Pembangunan dan Kerjasama.
3. Menciptakan kualitas pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan dan kerjasama yang lebih baik.
4. Mewujudkan kualitas kinerja birokrasi pemerintah secara profesional.

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas administrasi dan koordinasi kegiatan pembangunan dan kerjasama daerah.
2. Meningkatnya pengembangan infrastruktur daerah di bidang perhubungan.
3. Meningkatnya efektifitas dan pengembangan potensi kerjasama daerah.

Dari tujuan dan sasaran utama yang tertuang di dalam Rencana Strategis (Renstra) Biro Pembangunan dan Kerjasama di atas, maka disusunlah Rencana Kerja (Renja) Biro Pembangunan dan Kerjasama Tahun 2018 yang merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam periode 3 (tiga) tahun yang mencakup 9 (sembilan) kegiatan dalam 3 (tiga) program untuk mencapai tujuan dan sasaran utama yang telah tertuang di dalam rencana strategis Biro Pembangunan dan Kerjasama.

Secara keseluruhan capaian kinerja Biro Pembangunan dan Kerjasama pada tahun 2018 untuk realisasi keuangannya yaitu sebesar 97,89% sedangkan di Tahun lalu sebesar 96,62 % hal ini adanya kenaikan sebesar 1,27%. Penjabaran Program dan Kegiatan dimaksud tidak terlepas dari tugas pokok dan fungsi Biro Pembangunan dan Kerjasama Setda Provinsi Jambi untuk mencapai Visi Sekretariat Daerah dan Misi biro dalam meningkatkan kinerja aparatur yang ada. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam mengalokasikan program dan kegiatan yang dikelola Biro Pembangunan dan Kerjasama Setda Provinsi Jambi diarahkan pada tupoksi masing-masing bagian yang besarnya disesuaikan dengan intensitas dan beban kerja masing-masing bagian, agar tertuang dalam pencapaian visi dan misi lebih optimal.

VISI

Visi Sekretariat Daerah Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

“Mewujudkan Birokrasi Pemerintah Daerah Yang Profesional, Responsif dan Berorientasi Pelayanan Publik Dalam Rangka Mendukung Terwujudnya Jambi “TUNTAS 2021”.

**“MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH YANG
PROFESIONAL, RESPONSIF DAN BERORIENTASI PELAYANAN PUBLIK
DALAM RANGKA MENDUKUNG TERWUJUDNYA JAMBI TUNTAS 2021”**

Dalam menunjang untuk tercapaian Visi dimaksud Biro Pembangunan dan Kerjasama Setda Provinsi Jambi mempunyai tujuan yang harus dilaksanakan, yaitu :

***MEWUJUDKAN EFEKTIFITAS PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN
DAN KERJASAMA DALAM DAN LUAR NEGERI***

STRATEGI

Strategi Biro Pembangunan dan Kerjasama Setda Provinsi Jambi untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan, guna peningkatan kinerja pada periode 2016 - 2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dan lintas sektoral dalam memantau pelaksanaan program kegiatan pembangunan dan kerjasama pemerintah Provinsi Jambi.
2. Pelaksanaan kegiatan harus berbasis efisiensi dan efektif baik dari sumber daya manusia dan sumber dana yang ada.
3. Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan pembangunan dan kerjasama daerah.
4. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan Sumber Daya Aparatur dengan mengikuti Bintek yang sesuai dengan TUPOKSI, baik dalam Provinsi Jambi maupun yang diadakan oleh Kementrian dan lembaga yang membidangnya.

KEBIJAKAN

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Biro Pembangunan dan Kerjasama Setda Provinsi Jambi telah menyusun langkah-langkah kebijakan antara lain :

1. Meneliti program kegiatan pembangunan lingkup Setda Provinsi Jambi yang akan diusulkan.
2. Meningkatkan koordinasi antar dinas/instansi Provinsi dan kabupaten/kota dalam penyusunan program, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan APBD.
3. Menyiapkan bahan-bahan realisasi pelaksanaan APBD sebagai bahan evaluasi.
4. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan setiap triwulan.
5. Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana
6. Meningkatkan pengetahuan keterampilan sumberdaya manusia
7. Menyusun rencana kerja dan laporan akhir setiap tahunnya, dan berkoordinasi dengan dinas/instansi.

PROGRAM DAN KEGIATAN

Biro Pembangunan dan Kerjasama Setda Provinsi Jambi pada T.A. 2018 melaksanakan 3 (tiga) Program Kerja dan 9 (sembilan) Kegiatan yang terdiri dari :

- 1) Program Pembinaan dan Evaluasi Pembangunan
 - Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Pengendalian Program.
 - Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Program APBD.
- 2) Program Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan Bidang PU, Perhubungan dan PBJ Pemerintah.
 - Kegiatan Manajemen Pengadaan dan Informasi.
 - Kegiatan Sanggah, Pengaduan dan Pengembangan SDM
 - Kegiatan Fasilitasi Tata Usaha.
 - Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana Prasarana Fisik dan Perhubungan.
- 3) Program Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Kerjasama.
 - Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Kerjasama dengan Lembaga Pemerintah. Dan swasta.
 - Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri.
 - Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan di Bidang Kerjasama.

Gambaran secara utuh sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja yang ingin diraih Biro Pembangunan dan Kerjasama terdapat pada bab berikutnya.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

- Capaian Kinerja Organisasi
- Capaian Keuangan Organisasi
- Analisa Program/Kegiatan

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk mengetahui pencapaian sasaran yang ditetapkan, dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan kinerja yang direncanakan untuk masing-masing kelompok indikator yaitu indikator kinerja input, output, dan outcome pada tiap-tiap kegiatan yang dilaksanakan Biro Pembangunan dan Kerjasama Tahun 2018 untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan tersebut.

Sasaran dari Biro Pembangunan dan Kerjasama Setda Provinsi Jambi antara lain :

1. Meningkatnya kualitas administrasi dan koordinasi kegiatan pembangunan dan kerjasama daerah.
2. Meningkatnya pengembangan infrastruktur daerah serta fasilitas bidang perhubungan.
3. Meningkatnya efektifitas dan pengembangan potensi kerjasama daerah.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Biro Pembangunan dan Kerjasama Setda Provinsi Jambi telah menyusun langkah-langkah kebijakan antara lain :

1. Meneliti program kegiatan pembangunan lingkup Setda Provinsi Jambi yang akan diusulkan.
2. Meningkatkan koordinasi antar dinas/instansi Pemprov dengan dinas/instansi Pemkot/Pemkab dalam penyusunan program, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan APBD.
3. Menyiapkan bahan-bahan realisasi pelaksanaan APBD sebagai bahan evaluasi.
4. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan setiap triwulan.
5. Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana
6. Meningkatkan pengetahuan keterampilan sumberdaya manusia
7. Menyusun rencana kerja dan laporan akhir setiap tahunnya, dan berkoordinasi dengan dinas/instansi.

CAPAIAN KINERJA BIRO PEMBANGUNAN DAN KERJASAMA TAHUN 2018

NO	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja	
					Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Meningkatnya kualitas administrasi serta koordinasi kegiatan pembangunan daerah	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pembangunan	Capaian Program : Terpantaunya tahapan progress pengendalian fisik APBD di lapangan			
		Koordinasi Penyusunan dan Pengendalian Program Kegiatan Pembangunan di Lingkungan Pemda Provinsi Jambi	Input : Dana Output : Tersedianya data pelaksanaan dan pengendalian program pembangunan dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi sebagai bahan masukan pelaksanaan APBD yang akan datang berupa : - Renja Biro Pembangunan dan Kerjasama 2017 - Lakip Biro Pembangunan dan Kerjasama 2017 - Buku Program/Kegiatan 2017 - Laporan Akhir Tahun 2017 - Laporan 6 Januari 2017 - LPPD Biro Pembangunan dan Kerjasama 2017 - laporan pelaksanaan pengendalian Program APBD dilingkungan Pemprov Jambi Outcome : Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pembangunan secara optimal sesuai rencana yang telah diprogramkan			

Biro Pembangunan dan Kerjasama

		Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Pembangunan	Input : Dana Output : Terhimpunnya data laporan pelaksanaan pembangunan sebagai bahan pelaksanaan program APBD berupa : - buku laporan evaluasi triwulan - buku laporan evaluasi Tahunan - laporan evaluasi bulanan Outcome : Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan kegiatan pembangunan secara keseluruhan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.			
		Fasilitasi Administrasi Pembangunan Pada Biro Pembangunan dan Kerjasama	Input : Dana Output : Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Pembangunan pada Biro Pembangunan dan Kerjasama Outcome : terwujudnya tertib Administrasi Pembangunan pada Biro Pembangunan dan Kerjasama			
		Kegiatan Fasilitasi Sekretariat Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Provinsi Jambi	Input : Dana Output : Terlaksananya Fasilitasi Kesekretariatan Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Provinsi Jambi Outcome : Terpantaunya tahapan progress pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jambi	Tertib administrasi	Tertib administrasi	100

II	Meningkatnya pengendalian bidang pekerjaan umum perhubungan dan lingkungan hidup	Pembinaan dan Fasilitasi Pembangunan Bidang PU, Perhubungan dan Lingkungan Hidup	Capaian Program : • Terkoordinirnya rencana pengembangan infrastruktur jalan dan pengairan • Terpantaunya pengelolaan tata ruang dan pemukiman serta pelaksanaan JAKON • Terpantaunya penyelenggaraan sektor perhubungan dan jasa transportasi			
		Koordinasi Pembinaan dan Fasilitasi Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum	Input : Dana Output : Terkoordinasinya penyelenggaraan dan pengelolaan Bidang Bina Marga, Pengairan, Cipta Karya, Pemukiman dan Bidang Pekerjaan Umum lainnya : - Buku Laporan Outcome : Terwujudnya pengelolaan bidang pekerjaan umum yang sinergis di Provinsi Jambi serta pembinaan jasa konstruksi yang berkesinambungan			
		Koordinasi Pembinaan dan Fasilitasi Pembangunan Bidang Perhubungan	Output : Terpenuhinya data/informasi perhubungan dan penyelenggaraan sektor jasa transportasi serta meningkatkan pembinaan pengelolaan bidang kepelabuhan, berupa : - Buku laporan Outcome : Terciptanya koordinasi antara Dinas/Instansi terkait dalam upaya meningkatkan tertib penyelenggaraan sektor perhubungan di Provinsi Jambi			

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jambi mempunyai tugas dan fungsi. Sebagai bagian dari Sekretariat Daerah Provinsi Jambi, Biro Pembangunan dan Kerjasama mengemban Urusan Wajib Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

➤ **Biro Pembangunan dan Kerjasama**

Pada tahun 2018, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.400.000.000,- yang diarahkan untuk melaksanakan 3 (tiga) program dan 9 (Sembilan) Kegiatan yang menunjang pembangunan sebagai berikut:

1. Program Pembinaan dan Evaluasi Pembangunan

Pada tahun 2018 dialokasi anggaran untuk program ini Rp 462.897.900,- dengan tingkat realisasi mencapai Rp 426.115.091,- atau 92,05 %. Dari pelaksanaan program tersebut, diperoleh output sebagai berikut :

- a. Tersedianya data pelaksanaan dan pengendalian program pembangunan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, sebagai bahan masukan pelaksanaan APBD yang akan datang.
- b. Terhimpunnya data pelaporan realisasi APBD Provinsi Jambi sebagai bahan evaluasi pelaksanaan APBD.
- c. Terlaksananya fasilitasi administrasi pada Biro Pembangunan dan Kerjasama.
- d. Terpantaunya perkembangan fisik pembangunan APBD Provinsi Jambi di lapangan.

Secara umum, permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaannya antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Masih adanya pelaksanaan kegiatan yang belum sesuai dengan Renja Biro, sehingga kurang efisien dalam penggunaan sumber dana yang tersedia.
- b. Terbatasnya jumlah dan kemampuan SDM dalam menunjang intensitas kerja.
- c. Masih lemahnya koordinasi lintas sektoral dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.
- d. Belum adanya standar pelayanan minimal dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kegiatan APBD.

- e. Masih sering terlambatnya penyampaian Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan (LPPK) dari masing-masing SKPD sebagai bahan evaluasi.

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, maka solusi yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kinerja program ini pada masa yang akan datang adalah :

- a. Meningkatkan pembinaan dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan.
- b. Meningkatkan kemampuan SDM yang tersedia, dengan mengikuti diklat dan Bimtek di dalam maupun luar Provinsi Jambi.
- c. Melaksanakan Rapat Teknis Bidang Administrasi Pembangunan Kab/Kota dalam Provinsi Jambi, sebagai forum dalam menyampaikan informasi yang menunjang akselerasi pelaksanaan kegiatan pembangunan di Provinsi Jambi.
- d. Perlu dibuat suatu standar minimum dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kegiatan APBD.
- e. Perlu adanya koordinasi/tindak lanjut dalam pelaksanaan penyampaian bahan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan (LPPK).

2. Program Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan Bidang PU, Pembangunan dan PBJ Pemerintah.

Alokasi anggaran untuk program ini pada tahun 2018 berjumlah Rp 1.294.363.850,- dengan tingkat realisasi mencapai Rp 1.285.817.020,- atau 95,96 %. Dari pelaksanaan program tersebut, diperoleh output sebagai berikut :

- a. Terjalannya koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang bina marga, pengairan, cipta karya, pemukiman dan bidang pekerjaan umum lainnya.
- b. meningkatkan pembinaan pengelolaan bidang kepelabuhan dan Terjalannya koordinasi pembangunan bidang perhubungan serta penyelenggara sektor jasa transportasi umum
- c. Terjalannya koordinasi lintas daerah Kabupaten/Kota dalam pengendalian pengelolaan lingkungan hidup dan terhimpunnya laporan pemantauan keadaan lingkungan hidup di Provinsi Jambi.

Secara umum, permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaannya antara lain adalah sebagai berikut :

- a. koordinasi penyelenggaraan pembinaan Jasa Konstruksi Provinsi dan kab/kota, belum optimal disebabkan kab/kota belum membentuk Tim Pembinaan Jasa Konstruksi.
- b. Belum terakomodirnya Pembinaan dan Fasilitasi Bidang infrastruktur jalan yang tersebar di wilayah Provinsi Jambi, karena terbatasnya personil dan anggaran.
- c. Masih banyaknya masalah dalam Pembinaan Sektor Perhubungan dan Jasa Transportasi.
- d. Masih terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup yang berkaitan dengan aktifitas kegiatan pembangunan ekonomi yang dikelola tanpa memperhatikan keseimbangan lingkungan

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, maka solusi yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kinerja program ini pada masa yang akan datang adalah :

- a. Menjadwalkan secara periodik Rapat Koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi dan Kab/Kota.
- b. Menjadwalkan secara periodik Rapat Koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kab/Kota.
- c. Mengkoordinir dan mensinergikan program dan kegiatan dinas/instansi untuk kelancaran lalu lintas angkutan barang dan orang.
- d. Melakukan Koordinasi dengan Pemerintah Kab/Kota dalam upaya pengelolaan lingkungan guna terciptanya kegiatan pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan

3. Program Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Kerjasama.

Pada tahun 2018 dialokasi anggaran untuk program ini Rp 642.738.250,- dengan tingkat realisasi mencapai Rp 637.529.359,- atau 99,19%. Dari pelaksanaan program tersebut, diperoleh output sebagai berikut :

- a. Terelesainya dan ditandatangani 4 (empat) kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama antara pemerintah Provinsi Jambi dengan Kementerian / Kelembagaan dengan bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya.
- b. Terhimpunya data perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Pemerintah lainnya dan dengan lembaga.
- c. Terlaksananya fasilitasi administrasi pada Biro Pembangunan dan Kerjasama.

CAPAIAN KEUANGAN ORGANISASI

1) PAGU ANGGARAN.

Total anggaran untuk Biro Pembangunan dan Kerjasama Tahun 2018 pada APBD adalah sebesar Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah).

2) REALISASI KEUANGAN

Realisasi serapan anggaran pada tahun 2018 Biro Pembangunan dan Kerjasama Setda Provinsi Jambi yaitu sebesar Rp. 2.349.461.470,- (dua milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta empat ratus ratus enam puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) atau dengan capaian 97.89 % dari total anggaran yang tersedia.

3) KEGIATAN

Pagu Anggaran Biro Pembangunan dan Kerjasama APBD pada Tahun 2018 adalah Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah). Dengan realisasi serapan anggaran pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 2.349.461.470,- (dua milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta empat ratus ratus enam puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) atau dengan capaian 97.89 % dari total anggaran yang tersedia. Yang terdiri 3 (tiga) Program dan 9 (sembilan) Kegiatan, dengan capaian sebagai berikut :

1) Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Pengendalian Program.

Kegiatan ini di tahun 2018 mencapai target 85.68 % dari anggaran Rp. 249.322.900,- (Dua ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) dengan terealisasi sebesar Rp. 213.627.511,- (dua ratus tiga belas juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus sebelas rupiah).

2) Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Program APBD.

Kegiatan ini di tahun 2017 mencapai target 99.49 % dari anggaran Rp. 213.575.000,- (dua ratus tiga belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan terealisasi sebesar Rp. 212.487.020,- (dua ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu dua puluh rupiah).

3) Kegiatan Manajemen Pengadaan dan Informasi.

Kegiatan ini di tahun 2018 mencapai target 98,98 % dari anggaran Rp. 397.513.500,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) dengan terealisasi sebesar Rp. 393.450.607,- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).

4) Kegiatan Sanggah, Pengaduan dan Pengembangan SDM

Kegiatan ini di tahun 2018 mencapai target 99.58 % dari anggaran Rp. 259.186.700,- (dua ratus lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) dengan terealisasi sebesar Rp. 258.102.202,- (dua ratus lima puluh delapan juta seratus dua ribu dua ratus dua puluh rupiah).

5) Kegiatan Fasilitasi Tata Usaha.

Kegiatan ini di tahun 2018 mencapai target 99.96 % dari anggaran Rp. 362.663.650,- (tiga ratus enam puluh dua juta enam ratus enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah) dengan terealisasi sebesar Rp. 362.510.749,- (tiga ratus enam dua juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah).

6) Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana Prasarana Fisik dan Perhubungan.

Kegiatan ini di tahun 2018 mencapai target 98.82 % dari anggaran Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan terealisasi sebesar Rp. 271.753.462,- (dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus enam puluh dua rupiah).

7) Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Kerjasama dengan Lembaga Pemerintah. Dan swasta.

Kegiatan ini di tahun 2018 mencapai target 99.28 % dari anggaran Rp. 174.831.500,- (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) dengan terealisasi sebesar Rp. 173.578.575,- (seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).

8) Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri

Kegiatan ini di tahun 2018 mencapai target 99.39 % dari anggaran Rp. 299.575.250,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan terealisasi sebesar Rp. 297.741.034,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tiga puluh empat rupiah).

9) Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan di Bidang Kerjasama.

Kegiatan ini di tahun 2018 mencapai target 98.74 % dari anggaran Rp. 168.331.500,- (seratus enam puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) dengan terealisasi sebesar Rp. 166.209.750,- (seratus enam puluh enam juta dua ratus sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

ANALISA PROGRAM/KEGIATAN

➤ **Program Pembinaan dan Fasilitasi Pembangunan**

Secara umum, permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaannya antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Masih adanya pelaksanaan kegiatan yang belum sesuai dengan Renja Biro, sehingga kurang efisien dalam penggunaan sumber dana yang tersedia.
- b. Terbatasnya jumlah dan kemampuan SDM dalam menunjang intensitas kerja.
- c. Masih lemahnya koordinasi lintas sektoral dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.
- d. Belum adanya standar pelayanan minimal dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kegiatan APBD.
- e. Masih adanya keterlambat penyampaian Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan (LPPK) dari masing- masing SKPD sebagai bahan evaluasi.

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, maka solusi yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kinerja program ini pada masa yang akan datang adalah :

- a. Meningkatkan pembinaan dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan.
- b. Meningkatkan kemampuan SDM yang tersedia, dengan mengikuti diklat dan Bimtek di dalam maupun luar Provinsi Jambi.
- c. Melaksanakan Rapat Teknis Bidang Administrasi Pembangunan Kab/Kota lingkup Provinsi Jambi, sebagai forum dalam menyampaikan informasi yang menunjang akselerasi pelaksanaan kegiatan pembangunan di Provinsi Jambi.
- d. Perlu dibuat suatu standar minimum dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kegiatan APBD.

- e. Perlu adanya koordinasi/tindak lanjut dalam pelaksanaan penyampaian bahan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan (LPPK).

➤ **Program Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan Bidang PU, Pembangunan dan PBJ Pemerintah.**

Secara umum, permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaannya antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Koordinasi penyelenggaraan pembinaan Jasa Konstruksi Provinsi dan kab/kota, belum optimal disebabkan kab/kota belum membentuk Tim Pembinaan Jasa Konstruksi.
- b. Belum terakomodirnya Pembinaan dan Fasilitas Bidang infrastruktur jalan yang tersebar di wilayah Provinsi Jambi, karena terbatasnya personil dan anggaran.
- c. Masih banyaknya masalah dalam Pembinaan Sektor Perhubungan dan Jasa Transportasi.

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, maka solusi yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kinerja program ini pada masa yang akan datang adalah :

- a. Menjadwalkan secara periodik Rapat Koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi dan Kab/Kota.
- b. Menjadwalkan secara periodik Rapat Koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kab/Kota.
- c. Mengkoordinasikan dan mensinergikan antara program/kegiatan dari Biro Pembangunan dan Kerjasama dengan program/kegiatan dari dinas/instansi terkait demi kelancaran lalu lintas angkutan barang dan orang.

BAB IV. PENUTUP

- Tinjauan Umum
- Indikator dan Target Kinerja

TINJAUAN

UMUM

Akuntabilitas kinerja Biro Pembangunan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jambi merupakan perwujudan kewajiban Biro Pembangunan dan Kerjasama untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan misi Biro Pembangunan dan Kerjasama dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik selama satu tahun. Penjabaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Pembangunan dan Kerjasama dituangkan dalam Rencana strategis tahun 2016 – 2021 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja (RENJA) Biro Pembangunan dan Kerjasama, yang terdiri dari 3 (tiga) program dan 9 (sembilan) Kegiatan. Adapun hasil capaian kinerja keuangan tahun 2018 sebesar 97,89 %, dengan capaian sasaran utama yang menjadi tugas pokok dan fungsi Biro Pembangunan dan Kerjasama sebesar 100%.

Permasalahan Dan Kendala Utama

Meskipun program dan kegiatan sudah sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, namun masih memerlukan beberapa langkah perbaikan guna lebih menyempurnakannya. Secara umum, beberapa penyebab atau kendala yang sering ditemukan diantaranya adalah :

1. Masih adanya pegawai yang kurang menguasai Tupoksinya;
2. Mekanisme kerja yang kurang efektif;
3. Komitmen SKPD terhadap hasil evaluasi yang cenderung rendah;
4. Belum optimalnya koordinasi antar dinas/instansi terkait;
5. Produk/hasil fasilitasi per masalah belum dapat memuaskan *stake holders*;
6. Perubahan kebijakan pemerintah;
7. Keterlambatan penyampaian rekapitulasi hasil laporan dari masing-masing SKPD; dan
8. Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat.

Strategi Pemecahan Masalah

Strategi Biro Pembangunan dan Kerjasama Setda Provinsi Jambi untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan, guna peningkatan kinerja pada periode 2019 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dan lintas sektoral dalam memantau pelaksanaan program kegiatan pembangunan Provinsi Jambi;
2. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD yang lain agar tidak terjadi keterlambatan dalam penyampaian data dan laporan yang dibutuhkan;
3. Pelaksanaan kegiatan harus berbasis efisiensi dan efektif baik dari sumber daya manusia dan sumber dana yang ada; dan
4. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan Sumber Daya Aparatur dengan mengikuti Bimtek yang sesuai dengan TUPOKSI, baik dalam Provinsi Jambi maupun yang diadakan oleh Departemen yang membidangnya.